

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tuntutan akuntabilitas menjadi salah satu fenomena perkembangan pemerintahan di Indonesia saat ini. Tuntutan akuntabilitas tersebut terkait transparansi dan pemberian informasi yang relevan dan andal kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik (*good governance government*), yang kemudian mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik dapat dilakukan melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen yaitu: 1) laporan realisasi anggaran, 2) laporan perubahan saldo anggaran, 3) neraca, 4) laporan operasional, 5) laporan arus kas, 6) laporan perubahan ekuitas dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan

Pemerintah No.71 Tahun 2010). Apabila informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan sesuai dengan kriteria yang seharusnya, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai setiap tahunnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah. Presentasi kewajaran dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal. Dalam hal ini BPK memberikan 4 (empat) macam opini audit yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Indikasi semakin berkualitasnya pengelolaan keuangan daerah dapat ditandai dengan semakin banyaknya perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penilaian LKPD yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil pemeriksaannya. Opini WTP merupakan salah satu poin penting yang menjadi tolak ukur transparansi keuangan daerah yang dilakukan dengan wajar, bebas dari salah saji material, serta selaras dengan peraturan keuangan.

Pada penelitian ini, faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi yang berupa sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses

yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut harus terpadu dan saling berhubungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan dan Selamat, 2011). indikator pemanfaatan teknologi informasi meliputi : 1) proses kerja secara elektronik, 2) pengolahan dan penyimpanan data keuangan, 3) pengolahan informasi dengan jaringan internet.

Dalam penelitian Rahmawati., et al (2018) menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, utilisasi (pemanfaatan) teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Rosmalita dan Nadirsyah (2020) menemukan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Aceh. Aswandi (2018) didapatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Modo., et al (2016) didapatkan bahwa Penggunaan teknologi Informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengawasan. Pengawasan keuangan daerah adalah kegiatan sistematis yang ditunjukkan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan Pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan (Subekan dan Hartoyo, 2012:38).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan, dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Indikator pengawasan keuangan meliputi : 1) pemerintahan yang bersih dan bebas kkn, 2) evaluasi kegiatan, 3) pencatatan transaksi berdasarkan bukti, 4) pencatatan transaksi tepat waktu.

Dalam penelitian Pujiswara., et al (2014) menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Kusuma., et al (2016) menemukan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Jembrana. Rahmawati., et al (2018) menemukan bahwa sistem kontrol intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Aswandi (2018) didapatkan bahwa variabel pengawasan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba di kota Padang. Berdasarkan hasil

dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi variabel pengawasan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik sebagai penunjang kinerjanya untuk mewujudkan kualitas LKPD yang baik. Gasperz (2019) mengemukakan bahwa kompetensi ialah sejumlah atribut dalam diri individu hasil perpaduan dari pengetahuan, keahlian dan perilaku yang dapat mengoptimalkan kinerja individu itu sendiri.

Kompetensi SDM mempunyai korelasi dengan kualitas LKPD terkait pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib mempunyai SDM yang berkompeten, berpengalaman, dan berlatar belakang akuntansi. Dengan adanya pengalaman, pengetahuan dan hasil kerja yang dihasilkan oleh SDM tersebut akan mempengaruhi kualitas LKPD. Semakin berkompetensi SDM tersebut maka semakin berkualitas LKPD yang dihasilkan oleh pemerintah (Utama., et al, 2017). Indikator kompetensi sumber daya manusia meliputi : 1) kemampuan individu, 2) peran dan fungsi untuk mencapai tujuan, 3) memahami prosedur dan proses akuntansi, 4) pelatihan yang teratur.

Penelitian Yaqin dan Jatmiko (2018) menemukan bahwa kontribusi kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. Hafidz (2020) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan

Barat. Aswandi (2018) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan organisasi nirlaba. Aprisyah dan Anik (2021) didapatkan bahwa kompetensi SDM tidak mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi variabel kompetensi sumber daya manusia dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur. Perkembangan opini LKPD di Pemerintah Kabupaten Belu sampai dengan tahun anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel 1.1 :

**Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Pemerintah Kabupaten Belu**

LKPD	2016	2017	2018	2019	2020
OPINI	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPK RI, 2016-2020

Pemerintah Kabupaten Belu untuk pertama kalinya menyandang opini WTP atas hasil pemeriksaan BPK pada LKPD tahun anggaran 2018. Diraihnya opini WTP yang pertama ini tentunya bukan tanpa meninggalkan catatan-catatan masalah dari BPK. Catatan-catatan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018, sehingga Pemerintah Kabupaten Belu masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan semua permasalahan yang tercantum dalam LKPDnya agar menghasilkan LKPD yang lebih berkualitas. Adapun catatan – catatan dari BPK

tersebut adalah masih belum memadai pengelolaan aset baik aset tetap maupun aset lainnya, ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara, hal ini terlihat dari adanya 15 pekerjaan yang tidak dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 197.482.213.,25 dan juga terdapat kelebihan bayar kepada pihak ketiga senilai Rp. 174.636.264.90.

Salah satu hambatan utama pemerintah Kabupaten Belu dalam perjuangan meraih opini WTP ini adalah terkait dengan kesalahan pencatatan. Permasalahan yang ada dalam LKPD dapat disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan Pemerintah Kabupaten Belu telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) baik SIMDA Keuangan untuk proses penganggaran hingga proses pelaporan, maupun SIMDA BMD untuk pencatatan barang milik daerah sejak tahun anggaran 2016. Namun masih terdapat permasalahan yang kurang mendukung dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik karena kedua sistem tersebut belum terintegrasi dengan baik sehingga dalam penyajian data masih terdapat kesalahan pencatatan.

Dalam penyajian laporan keuangan tentu saja membutuhkan Sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi, sedangkan pada Pemerintah Kabupaten Belu masih belum terpenuhinya SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi dan dalam bidang teknologi informasi sehingga masih sering terjadi *human error*. Berdasarkan data yang diperoleh di

lapangan, diperoleh data pegawai yang menangani laporan keuangan pada unit organisasi pada Pemerintah Kabupaten Belu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. 1 Data Pegawai pengelola LKPD pada unit organisasi**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SMA	13 Orang
2.	DIPLOMA	58 Orang
3.	SARJANA (S1)	100 Orang

Sumber : BPKAD, 2021

Selain permasalahan pada bidang teknologi informasi dan SDM, terdapat juga permasalahan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah. Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa jumlah auditor pada inspektorat selaku lembaga pengawasan internal pemerintah masih belum cukup. Jumlah auditor hingga tahun 2020 berjumlah 20 orang dan melakukan pengawasan terhadap 34 Dinas, 12 Kelurahan dan 12 Kecamatan. Dari jumlah auditor yang belum memadai maka pengawasan yang dilakukan juga belum maksimal.

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.**



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum tentang pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Belu ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara signifikan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara signifikan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.
5. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berhubungan dengan penelitian. Adapun manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah informasi tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.
  - b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber

daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan  
Pemerintah Kabupaten Belu.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis berkaitan dalam pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.
- 2) Sebagai langkah penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah sebagai pemebelajaran yang terjadi dilapangan sehingga teori yang diperoleh dapat digunakan pada kondisi yang sesungguhnya.

### b. Bagi akademisi

- 1) Memberikan tambahan pengetahuan prodi dan kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya serta dapat menambah informasi dan referensi perpustakaan dan memberi manfaat bagi mahasiswa lain dalam penelitian lebih lanjut.
- 2) Dapat dijadikan referensi bagi penulis lainnya yang melakukan penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belu.

